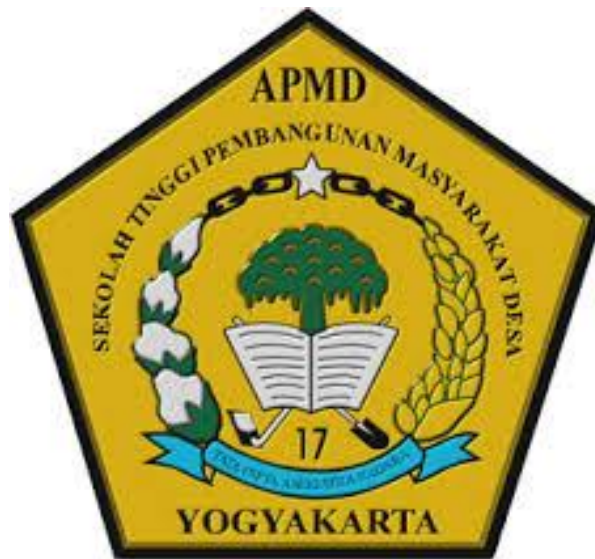


**KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM
MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN TRIDADI,
KAPANEWON SLEMAN. KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

**LISA STEVANI TRIYONO
16520118**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

**KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM
MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN TRIDADI,
KAPANEWON SLEMAN. KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Disusun Oleh :

**LISA STEVANI TRIYONO
16520118**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S-1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

YOGYAKARTA

2023


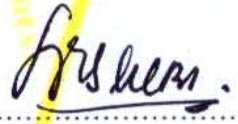

ii



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah di uji dan di perhatikan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana starta satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Hari : Selasa
Tanggal : 7 Februari 2023
Jam : 08:00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI	
NAMA	TANDA TANGAN
1. <u>Ir. Nelly Tiurmida, MPA</u> Ketua Penguji/pembimbing	
2. <u>Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D</u> Penguji Samping I	
3. <u>Utami Sulistiana S.P., M.P</u> Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Prodi Ilmu Pemerintah




Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LISA STEVANI TRIYONO

NIM : 16520118

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dengan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Yang Menyatakan



LISA STEVANI TRIYONO

MOTTO

Percayalah kamu tertinggal bukan karna kamu lemah,
tapi kamu kuat karna kamu masih bisa bertahan dan berusaha.

Tujuan utama dalam hidup ini adalah membantu orang lain. Dan, jika kita tidak dapat membantu mereka, setidaknya jangan menyakiti mereka.

(LISA STEVANI TRIYONO)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari banyak oihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doa, Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

1. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, karunia, rezeki, dan semua yang saya butuhkan, dan atas izinNya dan berkat-Nyalah skripsi ini dapat dibuat dan di selesaikan semestinya.
2. Kepada Almarhum Bapak Saya, Bapak Triyono saya mempersembahkan ini untuk beliau, walaupun dalam penyelesaian skripsi ini tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
3. Kepada Simbok saya, yang selalu dengan sabar membimbing saya, membesarkan saya penuh kasih sayang dari kecil sampai saat ini, saya harap beliau masih tetap umur panjang.
4. Kepada ibu saya yang telah melahirkan saya Ibu Carolina trimakasih karna telah melahirkan saya di Dunia yang keras ini, sehingga saya bisa merasakan lika-liku hidup.
5. Kepada Bapak Erli saputra dan Ibu Mawar yang telah membantu merawat saya, membersarkan saya, serta membantu untuk membiayai sekolah saya.
6. Kepada ibu Sambung saya ibu Nurlaila dan adik saya Akram yang selalu mensupport dab berdoa
7. Kepada keluarga Besar Sudiharjo-Kartorejo saudara saya yang telah mendoakan dan member support besar untuk saya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan semuanya.

8. Kepada tante Ragil, Dek Maria, Dan Patricia yang selalu mau direpotkan kesana-kemari,
9. Teman-teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan tahun 2016 yang sampai sekarang masih komunikasi baik dan selalu rewel untuk meyemangati saya menyelesaikan Skripsi ini (Thania, Ocin Mitak, Anjani, Grets, Rai)
10. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada kendala dan halangan dengan judul “KAPASITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENGGERAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT”

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab akademi, untuk mendapat gelar sarjana pada Sekolah tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, dukungan secara moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu sekali. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sutoro eko yunanto, M.Si., Selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA., selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA Selaku Dosen pembimbing yang dengan sangat baik dan sabar dalam membimbing, member saran-saran selama penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rr. Leslie Retno Angeningsih, Ph.D selaku penguji samping I dan Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku penguji samping II yang telah memberikan masukan dan saran pada skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Kepada Kalurahan Tridadi beserta jajarannya yang telah berkenan menerima saya, untuk melakukan penelitian di Kalurahan Tridadi.
7. Bapak R. Agus Kholiq, SE, MM Selaku Direktur BUMDes beserta jajarannya yang telah berkenan menerima saya untuk melakukan penelitian di BUMDes “Tridai Makmur” Kalurahan Tridadi.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan, maka penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 10 Februari 2023

Penyusun,

Lisa Stevani Triyono

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN.....	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	6
1. Konsep Kapasitas.....	6
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8
3. Partisipasi.....	11
4. Partisipasi Masyarakat	15
E. Ruang Lingkup Masalah.....	21
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Unit Analisis	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data	25
BAB II	27
PROFIL DESA TRIDADI DAN BUM DESA TRIDADI MAKMUR	27
A. Profil Desa Tridadi	27
B. Visi Misi Desa Tridadi	29

C. Kondisi Geografis.....	32
E. Kondisi Ekonomi.....	38
F. Sarana Dan Prasarana Ekonomi	39
G. Organisasi Pemerintah Desa	41
H. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tridadi Makmur	43
I. Identifikasi Unit-Unit Usaha Badan usaha Milik Desa (BUMDesa) Tridadi Makmiur “Puri Mataram”	48
B. Hasil Penelitian.....	54
BAB IV.....	80
KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan.....	23
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Yang Diperuntukan	33
Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Desa Tridadi Berdasarkan 15 Padukuhan	34
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2021	35
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga 2018-2021	36
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021	36
Tabel 2. 6 Mata Pencaharian Penduduk Desa Tridadi 2021.....	37
Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama 2021	37
Tabel 2. 8 Hasil Produksi Perikanan Tahun 2021	38
Tabel 2. 9 Hasil Peternakan Tahun 2021	39
Tabel 2. 10 Daftar Perangkat Desa Tridadi 2021	41
Tabel 2. 11 Badan Permusyawaratan Desa Tridadi 2021.....	42
Tabel 3. 1 Data Informan.....	51
Tabel 3. 2 Distribusi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 3. 3 Distribusi Informan Berdasarkan Usia	52
Tabel 3. 4 Distribusi Informan Berdasarkan Pendidikan	53
Tabel 3. 5 Distribusi Informan Berdasarkan Jabatan / Status.....	53

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Desa Tridadi Kecamatan Sleman	32
Bagan 2. 1 Struktur Kepengurusan BUMDes aTridadi Makmur	45

INTISARI

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi pariwisata. Salah satunya adalah Puri Mataram yang berlokasi di kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman yang dikelola secara Individu maupun mandiri oleh BUMDes Tridadi makmur dan masyarakat sekitar BUMDes tersebut. Dengan konsep yang ada Puri Mataram telah mengambil konsep budaya Mataram tempo dulu, dalam konsep tersebut menyajikan wisata alam, budaya, sejarah, edukasi, serta beberapa hiburan yang saling berkaitan. BUMDes Tridadi makmur mempunyai unit usaha yaitu Puri Mataram yang berdiri sejak 25 Desember 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan eksploratif, objek penelitian dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan objek wisata Tridadi Makmur oleh BUMDes di Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Subjek penelitian ini meliputi Lurah, Carik, Kasi Kesejahteraan, Kaur Pangripto, Sekretaris BPD, Anggota BPD, Direktur BUMDes, Sekretaris BUMDes, Anggota Pengawas BUMDes, Ketua PKK 2, Karang Taruna, Kepala Dusun dan Masyarakat. Dari anasumber ini berjumlah 14 orang. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian Kualitatif meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat, yaitu: dalam pengelolaan BUMDes Tridadi makmur dapat dilihat bahwa kapasitas pengelola BUMDes dalam menggerakkan masyarakat sudah dilakukan semaksimal mungkin, dan untuk orang-orang yang terlibat di pengelolaan BUMDes sendiri merupakan warga masyarakat Tridadi, hal ini juga dapat dikatakan bahwa BUMDes menyerap banyak tenaga kerja sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Kemudian kemampuan BUMDes untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui banyak cara yaitu dengan mengajak Masyarakat untuk menanam saham dengan keuntungan yang cukup. Dalam menggerakkan dan pengkoordinasian sumber daya yang dimiliki sebagai bagian dari usaha untuk dapat memberdayakan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat,

Kata Kunci: Kapasitas, Partisipasi, BUMDes

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit terkecil di dalam Struktur Pemerintahan Indonesia. Dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014, Desa diberikan kewenangan sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa, Pelaksana Pembangunan Desa, serta Memberdayakan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat berdasarkan hak asal-usul adat-istiadat dan kewenangan skala lokal desa. Desa secara langsung dapat menyentuh kebutuhan-kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan. Separuh Desa yang ada di Indonesia dapat dikatakan bahwa Desa yang masuk dalam kategori Desa tertinggal. Persoalan selama ini yang sering terjadi yaitu Desa termarginalkan oleh kepentingan industri dan kepentingan pasar Global. Kutipan tersebut ada dalam tulisan yang berjudul Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tulisan (Suhayati, 2021)

Desa ditantang untuk dapat mengenali potensi masing-masing yang ada di desa dan dapat mengelolanya demi kesejahteraan Warga nya. Namun, tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik, penggunaan dana desa dapat melenceng dari tujuan awalnya.

Dalam era ekonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

BUMDesa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDesa

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa,yaitu dari desa,oleh desa,dan untuk desa. Cara kerja BUMDesa adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional,namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Sehingga kedepannya BUMDesa akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penjelasan terkait dengan BUMDes juga dapat dimaknai sebagai penggerak Perekonomian Desa. Kebijakan ini merupakan isi paling penting dalam pengaturan BUMDes sesuai dengan amanat dari Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Maka dari itu BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mengusahakan, mendatangkan hasil dan manfaat yang jauh lebih baik untuk semua potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, dan potensi sumber daya alam (SDA) maupun Sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Sehingga Kehadiran BUMDes sendiri bertujuan untuk mengembangkan unit-unit usaha dalam mengusahakan potensinya. Apabila BUMDes maju dan berkembang, maka dimungkinkan bahwa lembaga ini akan sangat mungkin untuk mengikuti badan hukum yang sudah ada sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan. Tetapi BUMDes tidak pada keuntungan keuangan, tetapi dapat dikatakan berorientasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kapasitas BUMDes mempunyai peranan penting dalam menggerakkan masyarakat, sesuai dengan Undang-undang pembukaan Undang-Undang dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikannya Negara Kesatuan

Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Tridadi telah memberikan Laba keuntungan kepada masyarakat yang dimana BUMDes Tridadi Makmur telah menjajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam menanam saham. Kemampuan BUMDes bukan hanya mengajak masyarakat saja, tetapi BUMDes juga melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terkait BUMDes hal tersebut dikatakan tidak mudah dalam mengajak masyarakat tetapi Pengelola BUMDes mampu mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk ikut terlibat sampai BUMDes bisa sukses sampai saat ini. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi di desa , sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa.

Badan usaha milik desa (BUMDes) mempunyai peran penting dalam mengerakan partisipasi masyarakat desa. Kapasitas dari pengelola BUMDes sangat berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Kapasitas atau capacity dapat diartikan sebagai kemampuan. Menurut Moenir dalam Sulistia (2015: 04), kemampuan berasal dari kata mampu yang berhubungan dengan tugas ataupun pekerjaan sehingga dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang diinginkan. Kapasitas dalam hal ini berhubungan dengan tindakan ataupun perbuatan dari pengelola BUMDes dalam menggerakan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Kapasitas BUMDes dalam menggerakan partisipasi masyarakat juga dapat dilihat dari usaha dari pengelola BUMDes untuk mengajak masyarakat untuk bergabung serta ikut dalam menanam saham dengan mendapatkan keuntungan 51% untuk desa, dan 49% untuk masyarakat penanam saham. Dalam hal ini tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta bergabung menanam saham di BUMDes Tridadi Makmur, tetapi sejauh ini pengelola BUMDes berhasil untuk mengajak dan

menyakinkan masyarakat bahwa unit usaha yang dijalankan ini telah sukses sampai saat ini. Bukan hanya dalam hal itu saja Pengelola BUMDes juga melakukan sosialisasi atau memperkenalkan lagi ke masyarakat yang masih awam terkait dengan BUMDes.

Dalam hal ini juga bisa dilihat bahwa kapasitas BUMDes dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Kelurahan tridadi sudah terbilang baik, bisa dilihat dari BUMDes yang melakukan sosialisasi serta pengarahan kepada masyarakat yang masih awam terkait BUMDes dan disini juga pengelola BUMDes mengadakan pertemuan rutin, bukan hanya itu pemerintah juga memberikan pelatihan kepada Pengelola BUMDes agar kedepannya lebih baik lagi.

Partisipasi masyarakat dalam program BUMDes yang sudah ada di Kalurahan Tridadi dengan kondisi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi agar program pengelolaan BUMDes dapat berjalan langsung. Sehingga segala bentuk partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tindakan langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Demikian partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes bisa lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya akan lebih sesuai dengan kepentingan yang nyata dari masyarakat desa.

Kemampuan BUMDes juga dalam hal ini yaitu upaya mewujudkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program BUMDes. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat mengimbangi keterbatasan biaya. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat diharapkan bahwa partisipasi akan dimulai dari perencanaan, Pelaksanaan, Pemanfaatan hasil hingga pada tahap evaluasi pada unit usaha yang sudah ada di BUMDes Tridadi Makmur.

Dalam implementasi BUMDes terdapat beberapa masalah yang dialami oleh Pengelola BUMDes misalnya seperti kurang cekatan masyarakat dalam merespon masalah, masih sebagian masyarakat yang masih cuek akan adanya pengelolaan BUMdes yang sudah ada. Tetapi hal tersebut dijadikan patokan oleh Pengelola BUMDes dalam menyelenggarakan kegiatan di BUMDes Tridadi Makmur agar pengelola dapat menggerakkan dengan baik, sehingga BUMDes bertujuan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah:

Bagaimana Kapasitas Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disusun tujuan penelitian dari penelitian adalah sebagai berikut :

“Untuk mengetahui sampai mana kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan Partisipasi masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dapat digunakan menjadi tambahan bahan bacaan serta informasi sehingga dapat menambah wawasan untuk pembaca serta referensi yang jauh lebih baik
- b. Untuk mahasiswa atau penulis diharapkan agar mampu mengukur kemampuan dalam menggabungkan teori yang telah didapatkan pada masa perkuliahan dan

mengembangkan kemampuan berfikir secara ilmiah serta mampu menambah wawasan

- c. Untuk masyarakat Kalurahan Tridadi hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bahkan rujukan untuk melihat sampai mana kapasitas BUMDes dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
- d. Bagi pembaca semoga hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan kapasitas BUMDes dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan BUMDes.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Kapasitas

Kapasitas dijadikan sebagai kemampuan, pemahaman, kemampuan, sikap, nilai-nilai, perilaku, motivasi, hubungan, sumberdaya serta kondisi yang memungkinkan setiap organisasi, individu, jaringan kerja/sector, dan system yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi mereka dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu pendapat tersebut di kemukakan oleh Morgan dikutip dari (Lili Wulan Sari 2020). Kemudian Miller dikutip dari (Lili Wulan Sari 2020) mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan organisasi, individu atau menjalankan fungsi sebagai semstinya secara efisien, efektif, dan terus menerus.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan diatas, makadapat disimpulkan bahwa dalam suatu organisasi pemerintah desa harus memiliki suatu daya kesanggupan, pengetahuan, ketrampilan dalam tugas dan fungsi secara efesien dan efektif untuk mewujudkan suatu kesejahteraan.

Kapasitas dalam Pemerintah desa mempunyai beberapa Kapasitas yaitu:

1. Kapasitas responsif adalah kemampuan untuk mudah merasakan atau memiliki daya tanggap terhadap tujuan keberhasilan dan kebutuhan warga masyarakat untuk dijadikan sebagai basis serta perencanaan kebijakan pembangunan desa;
2. Kapasitas regulasi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengatur kehidupan desa beserta isinya yang mencakup wilayah, kekayaan, dan penduduk. Berdasrakan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan desa.
3. Kapasitas ekstraksi adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengarahkan, dan mengoptimalkan asset desa untuk menompang kehidupan pemerintah dan masyarakat.
4. Kapasitas distributif adalah kemampaun pemerintah desa dalam membagi sumber daya desa secara seimbang dan merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa yang paling dibutuhkan.
5. Kapasitas jaringan adalah kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan baik.

Bank Dunia (dalam Haryanto 2014: 16) Kapasitas memiliki lima aspek yaitu: (1) adanya pengembangan SDM, pemutusan pegawai professional, rekrutmen, serta manajerial dan teknis, (2) keorganisasian, yaitu pengaturan struktur, proses, sumber daya dan gaya menejemen yang ada. (3) networking yang berupa koordinasi, aktifitas oraganisasi, interaksi informal formal dan fungsi, (4) lingkungan organisasi, yaitu yang mempunyai aturan serta undang-undang yang mengatur pelayanan public, kekuasaan dan tanggung jawab, kebijakan serta daya dukung keuangan maupun anggaran, dan (5) memilki lingkungan yang luas yang meliputi faktor politik, ekonomi, serta kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja.

Kapasitas memiliki tiga elemen Menurut Grindle 1997: 22 dalam (Mukdar 2019: 14-15) yaitu :

- 1) Kebijakan kapasitas yaitu: kemampuan dalam membangun sebuah proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah serta memberikan analisis terhadap keputusan.
- 2) Implementasi kewenangan yaitu, sebuah kemampuan untuk menjalankan dan menggerakkan kebijakan baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar akan diterima secara baik oleh masyarakat.
- 3) Operasional efisien yaitu, kemampuan untuk memberikan pelayanan secara umum yang efektif dan efisien dan mempunyai tingkat kualitas yang memadai.

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kapasitas adalah kemampuan individu, organisasi ataupun suatu system dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien, efektif maupun berkelanjutan untuk mencapai target serta tujuan bersama. Didalam kapasitas juga memiliki tiga elemen yang penting untuk menjadi faktor penjabar dari kapasitas yaitu kebijakan kapasitas, implementasi kewenangan, serta operasional efisien.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa

pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-sebesarannya kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87, mengamatkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang –undangan. BUMDesa dengan demikian merupakan wadah bagi semua aktivitas ekonomi Desa.

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam bukunya yang berjudul Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyatakan bahwa, “BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.”

Putra (2015:9) menyatakan ada beberapa pengertian mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut :

- a. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan dalam menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- b. BUMDes merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan manusia yang ada di Indonesia.

- c. BUMDes juga menjadi salah satu model kemandirian masyarakat desa dengan menggerakkan unit usaha untuk kemandirian ekonomi yang ada di desa sebagai ekonomi kolektif desa.
- d. BUMDes juga merupakan salah satu bentuk kebijakan strategis untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa.

Sukasanto (2014: 32) telah menyatakan bahwa dalam pengelolaan BUMDes yang bertujuan agar tetap hidup dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan laba, mempertahankan dan meningkatkan penjualan, serta juga mampu menyelesaikan problem kemanusiaan dan social yang ada di desa. Maka dari itu, manajemen BUMDes harus mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi dengan memasarkan produk yang sudah ada.

Usaha desa merupakan salah satu jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa misalnya seperti : usaha jasa, perdagangan hasil pertanian, kerajinan masyarakat dan industry serta salah satu nya juga ada penyaluran Sembilan bahan pokok. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam pembentukan BUMDes menurut Pemandagri Nomor 39 tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya potensi usaha masyarakat yang sesuai
- b. Harus Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- c. Tersedianya sumber daya desa yang belum maksimal untuk dimanfaatkan secara optimal terutama pada kekayaan desa.
- d. Adanya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak ekonomi masyarakat desa.
- e. Untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan Masyarakat.

- f. Adanya unit usaha masyarakat merupakan kegiatan ekonomi yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- g. Adanya inisiatif dari masyarakat dan pemerintah desa dalam melakukan musyawarah desa.

Dalam pembentukan BUMDes harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah di diskusikan dalam musyawarah desa. Dengan adanya musyawarah desa yang telah dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, serta sebagian masyarakat kemudian dalam musyawarah tersebut mereka menyepakati akan dibentuknya suatu BUMDes.

3. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”.

Sumardi (2010 : 46) mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Terkait konsep partisipasi ini, Mikkelsen berpendapat bahwa konsep partisipasi telah menjadi bagian dari debat yang berkepanjangan antara lain terkait landasan teoritis dan dengan kemungkinan untuk diterapkannya (*Practical applicability*) yang terkait dengan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan non pemerintah. Selanjutnya, istilah partisipasi dan partisipatoris, menurut Mikkelsen Britha

(2003: 58) biasanya digunakan di masyarakat dalam berbagai makna umum, seperti berikut :

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat dalam suatu proyek (pembangunan), tetapi tanpa mereka ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan (*Participation is the voluntary contribution by people in project, but without their taking part in decision-making*);
- b. Partisipasi adalah proses membuat masyarakat menjadi lebih peka dalam rangka menerima dan merespons berbagai proyek pembangunan (*Participations is the sensitization of people to increase their receptivity and ability to respond to development projects*);
- c. Partisipasi adalah suatu proses aktif, yang bermakna bahwa orang ataupun kelompok yang sedang ditanyakan mengambil inisiatif dan mempunyai otonomi untuk melakukan hal itu (*Participations is an active process, meaning that the person or group in question take initiative and assert the autonomy to do so*);
- d. Partisipasi adalah proses menjembatani dialog antara komunitas lokal dan pihak penyelenggara proyek dalam rangka persiapan, pengimplementasian, pemantauan, dan pengevaluasian staf agar dapat memperoleh informasi tentang konteks sosial ataupun dampak sosial ataupun dampak sosial proyek terhadap masyarakat (*Participation is the fostering of a dialogue between the local people and the project or the programme preparation], implementation,*

monitoring and evaluation staff in order to obtain information on the local context and on social impacts);

- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang ditentukan sendiri oleh masyarakat (*participation is the voluntary involvement of people in self-determined change*);
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya pembangunan lingkungan, kehidupan, dan diri mereka sendiri (*Participation is involvement in people's development of themselves, their lives, their environments*).

Pusic (dalam Adi, 2003: 206-207) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas, berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu :

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan sisi negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sulit dilakukan, namun dapat digunakan dengan *system* perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah yang duduk dalam perwakilan apakah benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional ikut terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan yang seringkali tidak dapat dihindari.

Partisipasi menurut Sutoro Eko (2014:220-224), makna terdalam partisipasi adalah *voice, acces, dan control* warga masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

- a. ***Voice*** adalah hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri. *Voice* disampaikan oleh warga dengan banyak cara. Di Indonesia warga menyampaikan *Voice* melalui opini publik yang dimaikan oleh elemen –elemen Masyarakat melalui forum dan media massa.
- b. ***Acses*** berarti ruang dan kepastian masyarakat untuk masuk dalam arena governance, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta

terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Akses warga terhadap pelayanan publik termasuk dalam rubrik ini. Ada dua hal yang penting dalam akses keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involment*). Keduanya mengandung kesamaan tetapi berbeda titik tekannya. *Inclusion* menyangkut siapa yang terlibat, sedangkan *involment* berbicara tentang bagaimana masyarakat terlibat.

- c. **Control** warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Kata kontrol internal (*self-control*) dan kontrol eksternal. Arti kontrol bukan saja mencakup kapasitas masyarakat melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan resiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan warga melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap resiko-resiko dan tindakan mereka. Artinya kontrol eksternal (*self-control*) dimaksudkan untuk menghindari mata rantai penindasan sesama masyarakat, seraya hendak membangun tanggungjawab sosial, komitmen dan kompetensi untuk warga terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat menurut Rukminto Adi (2003:211) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Keikutsertaan masyarakat dalam berbagai tahap perubahan ini akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya dan dapat semakin memiliki ketahanan dalam menghadapi perubahan. Sebaliknya, bila masyarakat tidak banyak dilibatkan dalam berbagai tahapan perubahan hanya bersifat pasif dalam setiap perubahan yang direncanakan oleh pelaku perubahan (misalnya, pihak lembaga pemerintah LSM maupun sektor swasta), masyarakat cenderung akan menjadi lebih bergantung pada pelaku perubahan. Bila hal ini terjadi secara terus-menerus, maka ketergantungan masyarakat pada pelaku perubahan akan menjadi semakin meningkat.

Partisipasi masyarakat juga merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya. Sumbangan inisiatif dan kreatif tersebut dapat disampaikan dalam rapat kelompok masyarakat atau pertemuan baik yang bersifat formal maupun informal. Dalam rapat atau pertemuan kelompok itu dapat saling memberi informasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam partisipasi terdapat komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan antara sesama anggota masyarakat.

a. Tujuan partisipasi masyarakat

Menurut Schiller dan Antlov yang dikutip oleh Hetifah (dalam Andean, 2014:59) partisipasi masyarakat bertujuan untuk membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai.

b. Manfaat partisipasi masyarakat

Manfaat yang diperoleh dari adanya partisipasi masyarakat, sebagaimana pendapat ahli menurut Westra (dalam Rukminto Adi, 2003:65) manfaat partisipasi, antara lain:

- 1) Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- 2) Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat
- 3) Mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*human dignity*), dorongan (motivasi) serta membangun kepentingan bersama.
- 4) Mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab
- 5) Memperbaiki semangat bekerjasama serta menimbulkan kesatuan kerja.
- 6) Memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.

c. Bentuk partisipasi masyarakat

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

Menurut Holil (dalam Deviyanti, 2013:25) mengemukakan adanya beberapa bentuk partisipasi, antara lain :

- 1) Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha - usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
- 2) Partisipasi dalam bentuk uang adalah bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan untuk 14 memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian suatu program pembangunan. Partisipasi ini dapat berupa sumbangan berupa uang tetapi tidak dipaksakan yang diberikan oleh sebagian atau seluruh masyarakat untuk suatu kegiatan atau program pembangunan.
- 3) Partisipasi dalam bentuk harta benda adalah partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Adapun menurut Chaoin (dalam Deviyanti,2013:34)

mengemukakan adanya bentuk partisipasi masyarakat anatar lain :

- 1) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- 2) Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi berupa sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- 3) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.

- 4) Partisipasi representatif. Partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

d. Tingkatan partisipasi masyarakat

Untuk pengembangan partisipasi masyarakat, perlu pemahaman dasar mengenai tingkatan partisipasi. Menurut Cohen dan Uphoff dikutip oleh Soetomo (dalam Deviyanti, 2013:56-57) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat. Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran untuk pembangunan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi dalam bentuk harta benda.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yang diwujudkan keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai

atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.

e. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung dan menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program, timbulnya partisipasi merupakan ekspresi perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan, dimana perwujudan dari perilaku tersebut didorong oleh adanya tiga faktor utama pendukung, yaitu:

- 1) kemauan;
- 2) kemampuan; dan
- 3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Adapun beberapa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat menurut Watson yang dikutip oleh Soetomo (dalam Deviyanti, 2013:71) mengatakan bahwa ada beberapa kendala (hambatan) yang dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan antara lain kendala yang berasal dari kepribadian individu salah satunya adalah ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan karena rasa ketergantungan ini masyarakat tidak memiliki inisiatif untuk melaksanakan pembangunan atau prakarsa mereka sendiri.

Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat tersebut dapat dibedakan dalam faktor internal dan faktor eksternal, dijelaskan sebagai berikut :

1) Faktor Internal

Menurut Slamet (dalam Deviyanti,2013:73) untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan. Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

2) Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam Deviyanti, 2013:76), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), dalam hal ini *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program ini yaitu pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat/adat dan konsultan/fasilitator. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

E. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup yang akan di bahas di proposal ini mengenai :

1. Keterlibatan Masyarakat (*voice, Acces, Control*) dalam Pengelolaan BUMDesa
2. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan (*planing*) Pengelolaan BUMDesa
3. Keterlibatan masyarakat dalam Pengorganisasian (*Organizing*) Pengelolaan BUMDesa

4. Keterlibatan masyarakat dalam mengkordinasi (*Controlling*) pengelolaan BUMDesa

F. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr.Sugiyono metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkandata dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian Kualitatif ini dilakukan langsung pada kondisi alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kecil. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif, yaitu melakukan studi dengan penelusuran, terutama dalam pemantapana sebuah konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar. Dalam melakukan eksplorasi, konsep yang matang menjadi goal dalam penelitian dan jangkauan konseptual yang lebih luas lagi. Dalam penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Sehingga dalam penelitian ini melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). (Bogdan dan Biklen, 1982).

2. Unit Analisis

a. Objek penelitian

Objek penelitian merupakan atribut menilai orang, objek serta kegiatan yang , mempunyai variasi tertentu yang akan ditetapkan oleh peneliti kemudian menarik kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian yang menjadi informan di dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa, Pengelola BUMDes, Serta masyarakat desa yang sudah ikut berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes Puri Mataram. Adapun Teknik yang digunakan dalam Penentuan Informannya yaitu *Purposive*.

b. Subjek Penelitian

Dalam sebuah penelitian subjek penelitian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis karena pada subjek penelitian ini mempunyai data yang variable yang diamati oleh peneliti. Subjek penelitian ini meliputi perangkat desa, pengelola BUMDes serta masyarakat Tridadi di Kalurahan Tridadi berjumlah 14 orang. Subjek penelitian disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut

Tabel 1. 1 Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan
1	Sri Hartati, S.Pi.	Lurah
2	Johan Enri Kurniawan, S.E.	Carik
3	Ardhi Prasetyo	Kasi Kesejahteraan
4	Nurul Dwi Utami	Kaur Pangripto (perencanaan)
5	Edy Kadarisman	Sekretaris BPD
6	Ahmad Hanif	Anggota BPD
7	Agus Kholi	Direktur BUMDes
8	Johan Wiryanto	Sekretaris BUMDes
9	Mujirejo	Anggota Pengawas BUMDes
10	Kuskirin	Kutua PKK 2
11	Phutut	Karang Taruna
12	Waluya Jati	Kepala Dusun Drono
13	Yamtana	Kepala Dusun Pisangan
14	Suparlan	Masyarakat

Sumber : Data Primer diolah 2022

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan dari variable penelitian. Menurut Sujarwen (2014: 90) teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi kuantitatif dari responden, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

a. Observasi

Observasi merupakan aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrument dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lainnya, hal tersebut di nyatakan oleh Moris (dalam Hasanah, 2017: 26)

Dalam observasi yang telah dilakukan, observasi tersebut dilakukan dengan cara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah meneliti telah dilakukan, observasi tersebut dilakukan dengan cara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti telah meneliti tentang Partisipasi tentang Partisipasi masyarakat, pengelolaan BUMDes serta peran pemerintah desa.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi serta ide-ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menjadi wujud makna dalam suatu topic tertentu.

Sesuai dengan hasil wawancara yang ada, hasil wawancara tersebut dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam mendapatkan data-data yang ada. Sehingga peneliti telah menyiapkan Pedoman Wawancara sebelum melakukan penelitian. Sehingga hasil dari wawancara tersebut peneliti akan memperoleh data-data yang ada sesuai situasi yang telah dialami di BUMDes “Puri Mataram” Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman.

c. Dokumentasi

data yang telah diperoleh dari analisis dokumen dapat digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung bagi data primer yang telah diperoleh dari wawancara maupun observasi. Dokumen tersebut merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen juga bisa berbentuk tulisan, karya-karya, maupun gambar dari seseorang. Peneliti menggunakan teknik ini untuk melakukan observasi, wawancara beberapa informan yang ada di BUMDes Puri Mataram di desa Tridadi.

4. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2017:67). Teknik analisis data dapat dilakukan dengan model deskriptif kualitatif dimana intinya adalah interaksi antar komponen penelitian maupun proses pengumpulan data selama proses penelitian. Analisa data dilakukan untuk menganalisis Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan BUMDesa di Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Analisis data kualitatif yang dilakukan meliputi:

a. Reduksi Data

Data yang didapatkan lapangan harus sesuai dan bersifat kompleks, banyak dan rumit, maka dari itu perlu untuk dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian data yang diperoleh harus segera dianalisis dengan cara reduksi data. Mereduksi berarti merangkum serta meringkas hal pokok yang ada, focus pada hal penting serta memilih hal yang pokok untuk dicari pola dan temanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat memudahkan peneliti untuk suatu kesimpulan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan, setelah data yang telah di reduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori serta sejenisnya. sehingga data yang diperoleh mudah dipahami, sederhana serta menganalisis data deskriptif kualitatif yang sesuai.

c. Menarik Kesimpulan

Dari data yang ada, data tersebut akan disimpulkan berdasarkan validitas. Setiap informasi yang di dapatkan dari Informen akan di simpulkan, tetapi sebelumnya peneliti akan mencari penjelasan serta arti, kemudian menyusun pola pada hubungan tertentu, sehingga kesimpulan tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan.

BAB II

PROFIL DESA TRIDADI DAN BUM DESA TRIDADI MAKMUR

A. Profil Desa Tridadi

1. Sejarah Desa Tridadi

Berdasarkan maklumat Nomor 16 Tahun 1946 Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta (Kasultanan dan Pakualaman) tertanggal 11/04/1946, maka wilayah Kapanewon Sleman (18 Kalurahan) juga melaksanakan penggabungan Kalurahan 2 lama diantaranya :

1. Kalurahan lama Ngemplak Caban :

Mewilayahi : Kring Wadas, Paten, Ngemplak Caban dan Pangukan

2. Kalurahan Lama Beran Lor :

Mewilayahi : Kring Beteng, Pisangan, Dukuh, Beran Lord an Josari.

3. Kalurahan lama Beran Kidul :

Mewilayahi :Kring Drono, Beran Kidul, Kebonagung, Jaban, Denggung, Bangunrejo.

Untuk selanjutnya ketiga kalurahan lama meleburkan diri dan bergabung menjadi satu wilayah Pemerintahan baru dengan nama Tridadi. Sedangkan pengisian Lurah Desa serta Pamong Desa diatur sesuai dengan maklumat Nomor 15 Tahun 1946 tanggal 11/04/1946. Untuk yang menjabat Lurah Desa Pemerintahan Baru Kalurahan Tridadi, serta semua Pamong Desa Tridadi diangkat/dilantik pada tanggal 12/11/1946.

Sedangkan wilayah Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman terdiri dari wilayah/Kring :

1. Kring Wadas
2. Kring Paten
3. Kring Ngemplak Caban
4. Kring Pangukan
5. Kring Beteng
6. Kring Pisangan
7. Kring Dukuh
8. Kring Beran Lor
9. Kring Josari
10. Kring Drono
11. Kring Beran Kidul
12. Kring Kebonagung
13. Kring Jaban
14. Kring Denggung
15. Kring Bangunrejo

Adapun estafet tampuk kepemimpinan di Kalurahan Tridadi sampai saat ini adalah :

- Bapak Surodiharjo : menjabat dari tanggal 12 November 1946 sampai dengan tanggal 20 Juni 1968.
- Bapak HM. Siswoharjono : menjabat dari tanggal 13 Oktober 1970 sampai dengan tanggal 03 Oktober 1995.
- Bapak h. Kabul Mudji Basuki : yang menjabat selama 4 Periode
 - ❖ Periode I : tanggal 10 Juni 1996 sampai dengan 02 Maret 2004

- ❖ Periode II : tanggal 18 Mei 2004 sampai dengan 18 April 2009
- ❖ Periode III : tanggal 18 Juni 2009 sampai dengan 18 Mei 2015
- ❖ Periode IV : tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 18 Mei 2021
- Ibu Sri Hartati, S.Pi.: menjabat dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2026.

Oleh karena Lurah desa beserta pamong Desa Tridadi Kabupaten Sleman diangkat setelah penggabungan dan barusan Kalurahan Tridadi di angkat pada tanggal 12 November 1946, maka perkenankanlah pada tanggal tersebut dijadikan HARI JADI DESA TRIDADI.

B. Visi Misi Desa Tridadi

Desa Tridadi mempunyai Visi dan Misi Penyelenggaran Pemerintahan Desa .

1) Visi Misi Desa Tridadi

a. Visi

Terwujudnya Tridadi sebagai rumah bersama, kesejahteraan masyarakat Tridadi yang berbasis pada nilai-nilai religious dan pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan berbagai sumber daya secara inovatif untuk menuju Tridadi Bersinar Terang.

Misi

- i. Meningkatkan pelayanan prima yang cepat, tepat, dan akurat.
- ii. Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dengan tetap memperhartikan aspek legalitas, transparansi dan akuntabilitas.
- iii. Terwujudnya kebersamaan dan sinergi dari berbagai keanekaragaman, budaya, agama, dan kondisi social ekonomi.
- iv. Optimalisasi berbagai sumber daya dengan berbagai inovasi dan pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin.

Dalam menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan Desa Tridadi di buat suatu :

a. Strategi dan Kebijakan

Strategi Desa Tridadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Desa yang dapat dinilai dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi ; Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Desa. Arah Kebijakan Desa Tridadi yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa dan Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, yang setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan peraturan desa tentang anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) secara partisipatif dan transparan yang prosesnya melalui berbagai tahapan diantaranya musyawarah desa.

APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya di mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa pada tahun 2017 merupakan system pengelolaan keuangan yang baru bagi Desa, sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara keseluruhan sampai pada teknis Implementasinya.

Desa Tridadi memiliki skala prioritas dalam pembangunan adalah :

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana jalan, baik jalan lingkungan maupun perbaikan jalan poros desa guna untuk memudahkan transportasi bagi masyarakat.

- 2) Pembangunan drainase dan TPT (tembok penahanan Tanah) di lingkungan masyarakat.
- 3) Membentuk perekonomian masyarakat berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yang dirasakan cukup bermanfaat dan mudah.
- 4) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (Daerah Irigasi) mengendalikan cakupan air untuk pengairan sawah
- 5) Memberikan bantuan stimulant kelompok-kelompok masyarakat yang digunakan untuk pemeberdayaan.

b. Musyawarah Rencana Pemabangunan Desa

Musrenbang Desa di bagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu :

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBD Desa. Pada Tahun 2015 Desa Tridadi telah menyelesaikan RPJMdesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 tahun 2015.

Prioritas pembangunan di tahun 2017 diarahkan kearah infrastruktur jalan serta jaringan drainase baik berupa perbaikan maupun pembangunan baru aliran irigasinya yang saat ini banyak mengalami kerusakan bahkan tidak dapat difungsikan akibat rusak berat, karena sampai saat ini infrastruktur tersebut sangat berpengaruh dengan pendapatan petani Desa Tridadi

2) Rencana Kerja Tahunan Desa.

Rencana kerja Tahunan Desa merupakan rencana kerja pemabngunan desa yang dilaksanakan dalam jangka pendek atau tahunan yang kegiatannya dilaksanakan berdasarkan APBDdesa yang telah disetujui oleh BPD untuk

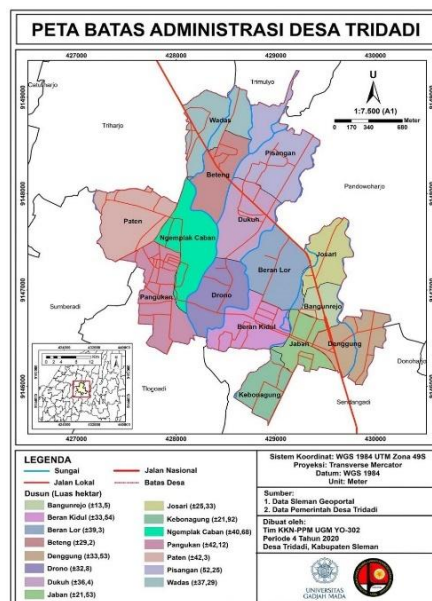
dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Dana Desa dan alokasi Dana Desa lain yang sah tidak mengikat, kegiatan ini merupakan bagian dari rencana pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya pertahun.

C. Kondisi Geografis

1. Kondisi Geografis Desa Tridadi

Desa Tridadi termasuk kedalam kecamatan Sleman dengan luas wilayah sebesar 504 Ha. Kalurahan Tridadi terletak di Ibukota kabupaten Sleman dan 3 km ke arah tenggara dari kantor Kapanewon Sleman. Secara geografis, Kalurahan Tridadi berada pada koordinat 110.35655 BT, dan -7.713411 LS. Ketinggian wilayah Tridadi berada pada 235 m sd 300 MDPL. Secara hidrologi dan klimatologi, curah hujan yang dimiliki rata-rata adalah 2225 mm/tahun, serta suhu rata-rata per tahun adalah 24 – 28 °C. Kalurahan Tridadi dialiri Sungai Bedog di sebelah barat dan beberapa anak sungai yang bermuara di sungai Bedog. Sungai tersebut relatif mengalir sepanjang tahun sehingga membantu dalam menjaga kondisi permukaan air tanah.

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Desa Tridadi Kecamatan Sleman



Sumber Data : Profil Desa Tridadi 2021.

Desa Tridadi merupakan salah satu Kalurahan yang terletak di dalam wilayah Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Kalurahan Tridadi lebih kurang berjarak 8 km sebelah Utara kota Propinsi, dan dari Kota Yogyakarta ditempuh kurang lebih selama 25 menit. Sedangkan dari kota Kabupaten Sleman berjarak lebih kurang dari 300 m ditempuh kurang lebih selama 2 menit dan dari kota Kapanewon Sleman berjarak kurang lebih 4 km dan ditempuh kurang lebih selama 5 menit.

2. Batas Wilayah

Adapun batas wilayah Desa Tridadi adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Desa Trimulyo, Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman
- b) Sebelah Timur : Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik dan Pandowoharjo Kecamatan Sleman
- c) Sebelah Selatan : Desa Sendangadi, Desa Tlogoadi, Kecamatan Mlati
- d) Sebelah Barat : Desa Sumberadi, Kecamatan Mlati dan Desa Triharjo Kecamatan Sleman

3. Luas Wilayah

Kalurahan Tridadi memiliki luas wilayah 504 Ha. Wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa peruntukan, yaitu: bangunan umum, jalan, sawah dan ladang, permukiman, pemakaman, dan lain-lain (lapangan olah raga). Rincian peruntukan pemanfaatan lahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Yang Diperuntukan

No	Jenis Peruntukan	Luas/Ha
1.	Bangunan Umum (Termasuk Perkantoran)	10 Ha
2.	Jalan Desa	10 Km
3.	Sawah dan Ladang	104 Ha
4.	Pemukiman	373 Ha
5.	Pemukaman	2 Ha
6.	Lain-lain (Termasuk Lapangan)	5 Ha
Jumlah		504 Ha

Sumber Data : Profil Desa Tridadi Tahun 2021

Berdasarkan data Tabel 2.1 diatas maka dapat dideskripsikan bahwa luas tanah yang diperuntukan untuk pemukiman sangat luas yakni 373 Ha, dan luas tanah yang diperuntukan untuk jalan sangat kecil yakni 10 Km. Sedangkan untuk bangunan umum termasuk perkantoran seluas 10 Ha, sawah dan ladang seluas 104, pemakaman seluas 2 Ha, serta lain-lain termasuk lapangan seluas 5 Ha, dengan luas tanah Desa Tridadi seluas 504 Ha.

Secara administratif, Desa Tridadi terbagi menjadi 15 padukuhan, 40 RW, dan 96 RT. Pembagian wilayah administratif tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Pembagian Wilayah Desa Tridadi Berdasarkan 15 Padukuhan

No	Nama Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Wedas	8	3
2.	Paten	8	3
3.	Ngemplak Caban	6	2
4.	Pangkan	12	5
5.	Benteng	6	2
6.	Pisangan	7	3
7.	Dukuh	6	3
8.	Beran Lor	7	3
9.	Josari	5	2
10.	Drono	5	2
11.	Beran Kidul	6	3
12.	Kebonagung	4	2
13.	Jaban	6	3
14.	Denggung	4	2
15.	Bangunrejo	6	2
Jumlah		96	40

Sumber Data : Profil Desa Tridadi 2021

Berdasarkan data Tabel 2.2 pembagian wilayah Desa Tridadi yang terdiri dari 15 Padukuhan dengan Jumlah RT 96 dan RW 40. Jumlah RT dan RW paling banyak terdapat pada wilayah Padukuhan Pangukan dengan Jumlah RT 12 Dan RW 5. Hal ini dapat dikatakan bahwa Padukuhan Pangukan merupakan wilayah terbesar dari padukuhan lainnya. Secara keseluruhan rata-rata jumlah RT dan RW di padukuhan relatif sama.

D. Keadaan Demografi

Keadaan Demografi Desa Tridadi

1. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan data administrasi kependudukan, Desa Tridadi mempunyai penduduk sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2018-2021

No	Jenis Kelamin	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Laki-laki	7.531	7.647	7.713	7.520
2.	Perempuan	7.554	7.701	7.776	7.813
Jumlah		15.085	15.348	15.489	15.333

Sumber Data : Profil Desa Tridadi 2021

Berdasarkan data Tabel 2.3 diatas maka dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk di Desa Tridadi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada akhir Tahun 2021 sebanyak 15.333 jiwa, terdiri atas laki-laki 7.520 jiwa dan perempuan 7.813 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kepala keluarga adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepala Keluarga 2018-2021

No	Jenis Kelamin	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1.	Laki-laki	8615	8681	8746	8753
2.	Perempuan	6443	6502	6540	6580
Jumlah		15.058	15.183	15.286	15.333

Sumber Data : Profil Desa Tridadi 2021

Berdasarkan data Tabel 2.4 diatas maka dapat dideskripsikan bahwa jumlah kepala keluarga secara umumnya selalu meningkat setiap tahunnya dari tahun 2018 sampai tahun 2021.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2021

No	Pendidikan	Jumlah Orang
1.	SD	1.667
2.	SLTP	2.100
3.	SLTA	5.264
4.	D3	609
5.	Sarjana (S1, S2, dan S3)	2.630
6.	Tidak Tamat SD	1.469
7.	Tidak/Belum Sekolah	1.594

Sumber Data : Profil Desa Tridadi 2021

Berdasarkan data Tabel 2.5 diatas maka dapat dideskripsikan data penduduk Desa Tridadi berdasarkan tingkat pendidikannya didominasi lulusan SLTA, dengan jumlah 5.264 orang. Sedangkan lulusan sarjana sebanyak 2.630 orang. Hal ini menggambarkan sumber daya manusia di Tridadi cukup terdidik karena lebih dari lima puluh persen merupakan lulusan SLTA dan sarjana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas* : Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Andrean, Rizal.2014. *Skripsi* : Studi Tentang Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Jurnal Administrasi Negara, 2(4): 1938-1951. Universitas Mulawarman. [http://JurnalRIZALANDREEYAN%20\(12-02-14-05-54-01\)](http://JurnalRIZALANDREEYAN%20(12-02-14-05-54-01))
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Bandung : Rossa Karya.
- Britha, Mikkelsen. 2003. *Metode penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya).
- Deviyanti, D. 2013. *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan*. Ejournal Administrasi Negara. Volume 1 Nomor 2. From <http://ejournal.an.fisip-unmul.org>
- Fauzi & Irviani, R. (2018). *Pengantar manajemen edisi revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamidi. 2005. *Metode penelitian kualitatif*. Malang : UMM press
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- R.Terry, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- R.Terry, George. & Leslie, R.W. (2010). *Asas-asas manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tisna, G.D., & Sudarmada, I.N. (2014). *Manajemen olahraga*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan dari Prespektif Pelayanan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Syamsu, Yusuf. 2010. *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung : PT Remaja Rosada Karya
- Putra, S. A. (2015). *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Yunanto, Sutoro Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS

Daftar Laman Internet

<https://id.scribd.com/doc/303798356/Buku-Desa-Membangun-Indonesia-Sutoro-Eko>

[https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN`](https://www.academia.edu/12213778/TEORI_PENGELOLAAN)

[https://mediacenter.slemankab.go.id/.](https://mediacenter.slemankab.go.id/)

Lain-lain

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang No 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

SKRIPSI

Silvianti Yuni,2018. *Skripsi*.Pengembangan Desa Wisata Nglinggo Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi S1 STPMD APMD